

Bangoan yang terjadi seputar kehidupan mereka. Salah satu persoalan yang membuat peneliti tertarik adalah aspek pembangunan lingkungan yang selama ini keterlibatan warga dalam pembangunan untuk memperbaiki jalan (*infrastruktur*) yang rusak, dan sering banjir ketika dalam keadaan hujan lebat dan jalan tidak bisa dilewati oleh warga atau pengguna jalan lainnya, sehingga warga tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari ketika dimusim hujan karena jalan yang rusak/becek dan sering terjadinya banjir di kampung Bangoan tersebut, dari permasalahan yang sudah di jelaskan diatas, warga sudah berupaya untuk meminta bantuan kepada pemilik tambak dan para pengguna jalan setiap harinya, akan tetapi dari upaya warga tersebut semua upaya yang sudah dilakukan oleh warga setempat untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam rangka untuk mencari solusi dari persoalan di atas ternyata dari upaya warga yang sudah di lakukan ada suatu hambatan yang mana proses pembangunan lingkungan atau jalan (*infrastruktur*) menjadi kurang bisa optimal didalam melakukan pembangunan lingkungan, hambatan tersebut di karenakan ada salah satu oknum pemerintah desa setempat yang tidak bisa transparan dalam mengelolah keuangan yang diperuntukan untuk pembangunan lingkungan infrasrtruktur di kampung Bangoan tersebut.

Pada awalnya warga sangat percaya ketika uang hasil sumbangan dari donatur untuk perbaikan jalan di kampung Bangoan dipegang oleh ketua RT Kedung Peluk, akan tetapi dari kepercayaan yang sudah diberikan oleh warga terhadap ketua RT yang selaku mengelolah uang ternyata disalah gunakan oleh ketua RT Kedung Peluk. Sehingga pembangunan lingkungan infrastruktur yang ada di kampung Bangoan tidak bisa berjalan dengan lancar yang apa yang sudah di harapkan oleh warga sebelumnya. Yang lebih ironisnya lagi warga sama sekali tidak tahu kejelasan uang yang dipegang oleh ketua RT Kedung Peluk, karena tidak

adanya kejelasan soal uang diperuntukan dan digunakan untuk apa sebenarnya uang tersebut, sebenarnya warga juga sudah berupaya untuk menanyakan soal keterkaitan uang tersebut hasil donatur untuk pembangunan lingkungan infrastruktur terhadap ketua RT Kedung Peluk, ternyata hasil dari upaya warga sama sekali tidak membuahkan hasil yang memuaskan, alasan dari pada ketua RT uang hasil donatur terbilang sudah habis dengan alasan untuk pembelian material (*sertu*) sebanyak 3 truck yang sudah di kirim ke kampung Bangoan, dari pengakuan ketua RT tersebut warga tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena yang mengetahui dan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan uang hasil donatur tersebut adalah ketua RT sepenuhnya dan warga hanya bisa pasrah saja apa yang sudah menjadi kebijakan dari pada ketua RT Kedung Peluk khususnya, sedangkan peran dari pemerintah desa sendiri tidak mengetahui persis persoalan apa yang sebenarnya terjadi dikampung Bangoan, dan tidak ada satupun lembaga-lembaga pemerintah desa setempat atau organisasi non pemerintah (ORNOP) yang membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di kampung Bangoan. Di kampung Bangoan sendiri juga tidak terdapat lembaga atau organisasi non pemerintah (ORNOP) yang terorganisir sehingga tidak ada yang ikut mengawasi atau memonitoring dalam proses pembangunan lingkungan yang ada di kampung Bangoan. Untuk lebih jelasnya lagi melihat kondisi lingkungan infrastruktur di kampung Bangoan dapat di lihat gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Jalan kampung Bangoan dalam keadaan becek

Gambar diatas merupakan salah satu contoh gambar yang menjadi permasalahan utama yang menyangkut tentang sektor pembangunan lingkungan (infrastruktur). Rio de Janeiro tahun 1992 mengamanatkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan di sektor lingkungan hidup, pertambangan dan energi, transportasi dan permukiman. Pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pembangunan lingkungan secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Intinya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan diperlukan adanya kegiatan pengaturan terhadap pengembangan lingkungan hidup, dimana sarana untuk melakukan pengaturan tersebut merupakan kepranataan atau institusi yang menjadi kunci pengembangan dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kepranataan tersebut mencakup

Secara umum, governance merujuk kepada perubahan dalam peran, struktur dan proses pelaksanaan pemerintah atau cara-cara berbagai problem sosial diselesaikan, bahwa governance secara umum dapat dipahami sebagai berbagai cara yang beragam untuk menyelesaikan persoalan umum, termasuk persoalan-persoalan organisasional, sosial, nasional, bahkan persoalan internasional sekalipun (Lee, 2003;4). Dengan pendefinisian ini, governance pada umumnya mengacu kepada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana bentuk kekuasaan, persoalan otoritas, pola hubungan serta hak dan kewajiban diantara orang-orang dalam menghadapi persoalan bersama (Newman, 2001).

Melihat uraian dari permasalahan yang dijelaskan diatas bahwa sebagai mana warga mempunyai suatu potensi yang perlu digali lebih dalam lagi yaitu adanya partisipasi warga dalam proses pembangunan, karena dengan adanya suatu partisipasi dari warga maka kemungkinan besar permasalahan yang ada dikampung Bangoan akan cepat terselesaikan dan akan muncul suatu perubahan, Camman (1976), Dunk (1993), Merchant (1985) dan Onsi (1973) menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan mengurangi kecenderungan untuk menciptakan perubahan.

Potensi yang lain juga perlu dikembangkan secara penuh yaitu dengan menciptakan kesadaran kritis terhadap warga karena mereka perlu ditumbuh kembangkan agar mereka sensitif, dalam melihat ketimpangan dalam struktur dan sistem masyarakatnya, sehingga diharapkan kelak mereka bisa menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik dari masa sekarang. Berdasarkan urgenisitas masalah-masalah tersebut, maka peneliti memutuskan untuk memilih pendampingan masyarakat dalam memunculkan keterlibatan warga Bangoan secara aktif dalam proses pembangunan sebagai tema riset aksi. Selanjutnya, peneliti



usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan, oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.²

Arthur Dunham mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisir yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Masyarakat memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri.³ Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk mempekuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penulisan bisa terarah. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks dan fokus penelitian, maka sistematikannya adalah sebagai berikut :

³.M.Ali Aziz ,Rr. Suhartini. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005, Hal,169.

⁴. Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal, 59-60.

⁵. Lowe dan Shaw (1968) dan Young (1985).<http://www.pengertian.keterlibatan.com>

